

**PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI PEMILIHAN
UMUM 2024 MASYARAKAT**

(Studi Kasus di Kecamatan Bangkalan)

Farhath Fauwasz¹, Bagus Imam Faisal²

¹²Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP PGRI Bangkalan
Alamat e-mail : farhathfauwasz2@gmail.com¹, bagusimam@stkip PGRI-bkl.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to explore the influence of social media on community political decision-making in Bangkalan District in the context of the 2024 General Election. The study highlights the growing influence of digital platforms in shaping public opinion and political behavior in local communities. Using a qualitative descriptive approach and case study design, data was collected through in-depth interviews and content analysis of political discussions on social media platforms such as Facebook, TikTok, Instagram, and WhatsApp. The results show that social media has a strong influence in shaping political preferences and participation, especially among young voters. However, this study also reveals challenges in the form of the spread of false information and the low level of digital literacy of the community. In conclusion, although social media increases political engagement, it is necessary to increase awareness and critical thinking skills through digital literacy education to support a healthy democratic process.

Keywords: social media, political behavior, elections, digital literacy, Bangkalan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap pengambilan keputusan politik masyarakat di Kecamatan Bangkalan dalam konteks Pemilu 2024. Studi ini menyoroti semakin besarnya pengaruh platform digital dalam membentuk opini publik dan perilaku politik di komunitas lokal. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis konten terhadap diskusi politik di platform media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh kuat dalam membentuk preferensi dan partisipasi politik, terutama di kalangan pemilih muda. Namun, studi ini juga mengungkap tantangan berupa penyebaran informasi palsu dan rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Kesimpulannya, meskipun media sosial meningkatkan keterlibatan politik, diperlukan peningkatan kesadaran dan kemampuan berpikir kritis melalui pendidikan literasi digital untuk mendukung proses demokrasi yang sehat.

Kata Kunci: media sosial, perilaku politik, pemilu, literasi digital, Bangkalan

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat telah menciptakan transformasi besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal bagaimana mereka mengakses, mengelola, serta menyebarkan berbagai bentuk informasi. Salah satu perubahan paling signifikan terjadi dalam ranah komunikasi politik. Dahulu, informasi politik hanya dapat diakses melalui media konvensional seperti televisi, radio, atau surat kabar. Namun kini, dengan hadirnya media sosial sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari, pola konsumsi dan partisipasi masyarakat dalam politik turut mengalami pergeseran yang mendasar. Media sosial yang awalnya dirancang sebagai sarana hiburan serta komunikasi interpersonal telah berevolusi menjadi ruang publik digital yang sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, budaya, ekonomi, hingga ke ranah politik. Di Indonesia, penggunaan media sosial terlihat semakin intens menjelang momentum-momentum penting seperti Pemilihan Umum (Pemilu), di mana platform seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan WhatsApp

tidak hanya digunakan untuk bersosialisasi, tetapi juga dimanfaatkan secara masif sebagai medium kampanye politik, penyebaran isu, serta arena pembentukan dan penguatan opini publik secara luas dan terstruktur.

Dalam konteks yang lebih lokal, Kecamatan Bangkalan yang berada di Pulau Madura menawarkan latar sosial-budaya yang khas dan menarik untuk diteliti, terutama dalam kaitannya dengan dinamika digitalisasi dan politik. Masyarakat Bangkalan dikenal memiliki nilai religiositas yang kuat dan berpegang teguh pada norma-norma adat serta tradisi lokal. Meski demikian, arus digitalisasi yang begitu deras, khususnya di kalangan generasi muda, telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan pola komunikasi. Media sosial kini telah menjadi salah satu sumber informasi utama yang sangat diandalkan masyarakat, tidak hanya untuk memperoleh berita, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi tentang isu-isu nasional maupun lokal, serta menyalurkan aspirasi politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehadiran media sosial turut memengaruhi cara masyarakat

memandang realitas politik, menentukan sikap terhadap calon pemimpin, serta mendorong keterlibatan aktif dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum. Dengan kata lain, media sosial telah membuka akses yang lebih luas dan demokratis bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pengamat, pendukung, maupun kritikus.

Namun demikian, keberadaan media sosial sebagai ruang politik digital tidak lepas dari berbagai persoalan yang mengiringinya. Salah satu tantangan paling signifikan adalah masih rendahnya tingkat literasi digital di berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan pengguna yang baru mengenal media sosial. Ketidaktahuan akan cara kerja algoritma, lemahnya kemampuan dalam melakukan verifikasi informasi, serta kebiasaan membagikan ulang konten tanpa penyaringan menjadi pemicu utama tersebarnya hoaks dan disinformasi politik. Arus informasi yang tidak tervalidasi ini tidak hanya menciptakan kebingungan, tetapi juga dapat memperkeruh suasana politik dan memecah belah masyarakat ke dalam kubu-kubu yang saling bertentangan. Polarisasi yang terjadi

sering kali tidak berdasarkan pada fakta atau argumentasi yang sehat, melainkan didorong oleh sentimen emosional dan narasi yang manipulatif. Fenomena ini tentu menjadi tantangan serius dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkeadaban.

Oleh karena itu, penting adanya kajian akademik yang mendalam mengenai bagaimana media sosial berfungsi dan berperan dalam membentuk perilaku politik masyarakat, khususnya dalam konteks lokal seperti di Kecamatan Bangkalan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dampak positif dari media sosial seperti meningkatnya partisipasi politik, keterlibatan masyarakat dalam diskusi publik, serta tumbuhnya kesadaran kritis terhadap isu-isu politik, tetapi juga ingin menelaah secara kritis sisi gelap dari fenomena ini. Dampak negatif seperti penyebaran berita palsu, manipulasi opini publik, dan penguatan bias politik juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

1. Bagaimana peran penggunaan media sosial oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam konteks politik?

2. Bagaimana media sosial mempengaruhi pemilihan politik masyarakat di Kabupaten Bangkalan?

Oleh karena itu, penting adanya kajian akademik yang mendalam mengenai bagaimana media sosial berfungsi dan berperan dalam membentuk perilaku politik masyarakat, khususnya dalam konteks lokal seperti di Kecamatan Bangkalan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dampak positif dari media sosial seperti meningkatnya partisipasi politik, keterlibatan masyarakat dalam diskusi publik, serta tumbuhnya kesadaran kritis terhadap isu-isu politik, tetapi juga ingin menelaah secara kritis sisi gelap dari fenomena ini. Dampak negatif seperti penyebaran berita palsu, manipulasi opini publik, dan penguatan bias politik juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menemukan jawaban atas bagaimana media sosial dapat digunakan secara bijak dan bertanggung jawab untuk memperkuat kesadaran politik masyarakat, sekaligus merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi digital agar

partisipasi politik yang terbentuk benar-benar mencerminkan kualitas demokrasi yang sehat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus sebagai strategi utama dalam menjawab permasalahan yang diangkat. Pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif dilakukan dengan pertimbangan bahwa jenis pendekatan ini mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, mendalam, dan holistik terhadap fenomena sosial yang bersifat kompleks, yaitu terkait dengan bagaimana media sosial memberikan pengaruh terhadap perilaku politik masyarakat di wilayah Kecamatan Bangkalan. Dalam konteks ini, metode studi kasus dipilih karena memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengkaji fenomena secara kontekstual, dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, budaya, dan teknologi yang turut membentuk interaksi masyarakat dengan media sosial, khususnya dalam ruang politik digital.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua

teknik utama, yakni wawancara mendalam (in-depth interview) dan analisis konten (content analysis). Teknik wawancara dipilih untuk memperoleh informasi kualitatif yang kaya dan kontekstual dari para informan yang dianggap relevan dan memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik penelitian. Para informan tersebut dipilih secara purposive atau berdasarkan pertimbangan tertentu, meliputi pengguna aktif media sosial, kalangan akademisi yang memiliki fokus kajian pada isu politik atau media, tokoh masyarakat yang berperan dalam dinamika sosial-politik lokal, serta pengamat atau pemerhati politik di tingkat lokal. Pertanyaan dalam wawancara disusun secara terbuka dan fleksibel agar memungkinkan penggalian informasi secara mendalam terkait persepsi, pengalaman pribadi, serta pandangan kritis mereka mengenai peran media sosial dalam membentuk atau memengaruhi perilaku politik masyarakat Bangkalan.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi melalui teknik analisis konten terhadap berbagai unggahan, komentar, diskusi, dan interaksi lain yang berkaitan dengan

isu-isu politik di media sosial yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Bangkalan, seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola-pola komunikasi politik yang terbentuk, memahami jenis konten politik yang memiliki pengaruh paling besar terhadap audiens, serta mengevaluasi respons masyarakat terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang. Konten yang dianalisis tidak hanya terbatas pada materi kampanye atau pernyataan tokoh politik, tetapi juga mencakup reaksi warga, komentar warganet, hingga meme atau simbol politik yang tersebar secara luas.

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data yang dikumpulkan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai tipe informan dan jenis media sosial, sementara triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara dan analisis konten untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Selain itu, teknik *member checking* juga digunakan, yaitu

dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi data kepada informan yang bersangkutan, guna memastikan bahwa makna atau maksud dari pernyataan mereka tidak mengalami distorsi atau kesalahan tafsir. Seluruh data yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum masuk pada pembahasan yang lebih mendalam terkait hasil analisis penelitian, terlebih dahulu disajikan gambaran awal berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan sejumlah informan kunci. Informan pertama merupakan seorang mahasiswa yang secara aktif menggunakan platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar informasi terkait politik ia peroleh dari konten-konten singkat berupa video dan siaran langsung yang dilakukan oleh para calon legislatif. Menurutnya, pendekatan semacam ini membuat ia merasa lebih dekat dan terhubung secara emosional dengan kandidat yang tampil aktif serta responsif di ruang digital.

Selanjutnya, informan kedua adalah seorang ibu rumah tangga

deskriptif yang sistematis, dengan tujuan untuk menggambarkan secara utuh dinamika sosial-politik yang muncul akibat interaksi antara masyarakat dan media sosial dalam konteks lokal Kecamatan Bangkalan.

yang dalam kesehariannya cukup intens memanfaatkan aplikasi WhatsApp. Ia menceritakan bahwa dirinya kerap menerima pesan berantai yang mengandung muatan politik. Namun, karena informasi tersebut sering kali bertentangan satu sama lain, ia merasa bingung dalam menentukannya. Untuk mengklarifikasi, ia lebih memilih berdiskusi secara langsung dengan tetangga atau lingkungan sosial terdekat sebagai bentuk pencarian informasi yang dirasa lebih meyakinkan.

Informan ketiga berasal dari kalangan tokoh masyarakat yang juga menjabat sebagai pengurus Rukun Tetangga (RT). Beliau menyatakan bahwa media sosial telah menjadi wahana baru bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politik. Ia menambahkan bahwa tingkat antusiasme warga dalam berdiskusi

meningkat ketika mereka melihat adanya calon pemimpin yang mau menanggapi komentar, kritik, maupun pertanyaan melalui media sosial. Menurutnya, hal ini menciptakan hubungan timbal balik yang positif antara pemilih dan calon pemimpin.

Sementara itu, seorang akademisi lokal menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi literasi digital di masyarakat yang masih tergolong rendah. Ia menyoroti kecenderungan masyarakat dalam mempercayai begitu saja informasi yang sedang viral tanpa terlebih dahulu melakukan proses verifikasi terhadap sumbernya. Menurutnya, edukasi literasi digital

harus segera digencarkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Terakhir, seorang aktivis pemuda menyoroti bahwa media sosial kini telah menjadi instrumen penting dan strategis dalam pelaksanaan kampanye politik, terutama di kalangan pemilih pemula. Ia menekankan bagaimana peran influencer lokal cukup besar dalam membentuk opini publik, yang bisa berdampak positif ketika diarahkan dengan bijak, namun juga berpotensi negatif apabila digunakan untuk menyebarkan provokasi atau misinformasi.

Tabel 1

Hasil wawancara informan 1
Ringkasan Jawaban:
Aktif menggunakan Facebook sekitar 3 jam sehari.
Sering melihat meme atau postingan dukungan/tolak calon tertentu.
Pernah ikut menyebarkan hoaks karena terbawa emosi.
Sekarang lebih hati-hati dan memverifikasi info.
Aktif berkomentar dan menonton debat online.
Merasa media sosial bisa mendorong partisipasi dan edukasi politik.

Tabel 2

Hasil wawancara informan 2
Ringkasan Jawaban:
Online hampir seharian, akses TikTok dan Twitter.
Suka konten edukatif politik, mengikuti akun politisi muda.
Media sosial membentuk pemahamannya terhadap isu-isu penting.
Aktif membagikan, komentar, dan ikut webinar.
Sangat sadar akan hoaks, biasa cek di TurnBackHoax dan sumber kredibel.

Tabel 3

Hasil wawancara informan 3
Ringkasan Jawaban:
Aktif di TikTok dan Instagram sekitar 5 jam/hari.
Sering lihat kampanye singkat, meme, atau ajakan milih.
Mudah terpengaruh dan bingung dengan informasi bertentangan.
Belum tahu cara verifikasi yang benar, biasanya tanya guru.

Pernah repost konten politik, belum aktif secara mendalam.

Tabel 4

Hasil wawancara informan 4

Ringkasan Jawaban:

Gunakan Facebook dan WhatsApp malam hari.

Terima banyak info politik dari grup warga.

Menyaring informasi dengan logika dan cek ke sumber resmi.

Sering harus menengahi warga karena konflik politik di grup.

Membagikan info netral dan ajakan damai melalui status Facebook.

Tabel 5

Hasil wawancara informan 5

Ringkasan Jawaban:

Aktif di WhatsApp dan Facebook untuk komunikasi guru/pengajian.

Sering terima konten politik bernuansa keagamaan.

Selalu menyaring info sesuai logika dan nilai agama.

Mendorong masyarakat agar tidak asal menyebar info.

Mengedukasi jamaah dan wali murid agar melek politik.

Tabel 6

Hasil wawancara informan 6

Ringkasan Jawaban:

Gunakan Facebook dan Instagram 5–6 jam/hari untuk peliputan.

Ikuti akun politisi dan relawan untuk berita.

Media sosial bisa cepat membentuk atau menghancurkan citra tokoh politik.

Sering menangani laporan hoaks dan klarifikasi di redaksi.

Dari pengalaman dan pandangan berbagai informan tersebut, dapat dilihat bahwa media sosial telah berkembang menjadi lebih dari sekadar alat penyebaran informasi. Ia telah berubah menjadi ruang publik digital yang dinamis, kompleks, dan berperan penting dalam proses komunikasi politik masyarakat. Temuan awal ini menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana peran media sosial dalam mempengaruhi perilaku politik masyarakat di Kecamatan Bangkalan secara lebih mendalam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memainkan peranan yang sangat penting dan strategis dalam memengaruhi cara masyarakat Kecamatan Bangkalan merespons dinamika politik. Platform seperti TikTok dan Instagram sangat populer di kalangan pemilih muda karena mampu menghadirkan informasi politik dalam bentuk yang ringan, visual, dan menghibur. Konten-konten politik sering kali dikemas dalam bentuk video singkat, meme yang menarik, hingga infografis yang informatif, menjadikannya mudah

diakses dan dipahami oleh kalangan yang lebih muda.

Di sisi lain, platform seperti Facebook dan WhatsApp lebih banyak digunakan oleh kalangan yang lebih tua. Namun demikian, penggunaan kedua media ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Kebanyakan pengguna dari kelompok usia ini lebih percaya kepada informasi yang dibagikan oleh orang-orang terdekat, seperti keluarga atau teman, tanpa mempertanyakan kebenarannya terlebih dahulu. Akibatnya, hoaks dan disinformasi politik dengan mudah menyebar dan memengaruhi opini serta sikap politik masyarakat secara luas.

1. Peran Penggunaan Media Sosial oleh Masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam Konteks Politik

Seluruh Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial saat ini telah menjelma menjadi instrumen dominan dalam ekosistem informasi politik masyarakat di Kecamatan Bangkalan. Fungsi media sosial tidak lagi sekadar sebagai media komunikasi sosial atau hiburan,

melainkan telah bergeser menjadi arena penting bagi aktivitas politik masyarakat. Aplikasi populer seperti Facebook, WhatsApp, TikTok, dan Instagram menjadi sarana utama di mana warga saling bertukar informasi politik, membentuk opini, hingga berpartisipasi dalam percakapan politik yang bersifat terbuka maupun tersembunyi.

Temuan dari wawancara mengungkapkan bahwa generasi muda, seperti Lita (seorang mahasiswa) dan Rizal (pelajar), lebih mengandalkan media sosial dibandingkan media arus utama seperti televisi atau surat kabar dalam memperoleh informasi tentang calon legislatif maupun isu-isu kampanye terkini. Media sosial bagi mereka bukan hanya berperan sebagai sumber informasi, tetapi juga menjadi wahana mengekspresikan dukungan, kritik, atau membentuk sikap terhadap isu politik tertentu. Hal ini memperlihatkan bahwa generasi digital native memiliki pola konsumsi informasi politik yang cenderung aktif, selektif, dan responsif.

Berbeda halnya dengan kalangan usia lanjut, seperti Pak Rahman (tokoh masyarakat) dan Bu Nur (seorang guru), yang meskipun menggunakan media sosial, menunjukkan pola keterlibatan yang lebih pasif dan berhati-hati. Mereka cenderung menyimak konten yang beredar melalui grup WhatsApp keluarga atau komunitas, namun menyaring informasi tersebut dengan lebih ketat sebelum mempercayainya. Ini menandakan adanya perbedaan dalam literasi digital antar kelompok umur, yang berdampak pada cara mereka menafsirkan pesan-pesan politik.

Lebih dari sekadar alat penyebaran informasi, media sosial juga berperan sebagai ruang publik baru untuk diskusi politik yang bersifat interaktif dan inklusif. Beberapa informan aktif tidak hanya dalam menyimak, tetapi juga dalam menyebarkan ulang konten politik, mengomentari unggahan tokoh atau partai, serta membagikan pandangan politik mereka secara langsung kepada jejaring pertemanan digitalnya. Fenomena ini menunjukkan adanya partisipasi politik non-

konvensional yang berlangsung secara informal, tetapi memiliki potensi besar dalam mempengaruhi dinamika politik lokal.

Namun demikian, keberadaan media sosial sebagai ruang politik digital juga menyimpan tantangan serius. Di balik kemampuannya mendorong partisipasi politik, media sosial juga membuka ruang bagi penyebaran informasi yang menyesatkan. Dalam konteks menjelang Pemilu 2024, beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka menghadapi kesulitan dalam membedakan antara berita politik yang faktual dengan hoaks yang sengaja diproduksi untuk memanipulasi opini. Rendahnya literasi digital menjadi salah satu penyebab utama masyarakat mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara etis maupun faktual. Maka, media sosial bukan hanya ruang yang memperkaya demokrasi, tetapi juga ruang yang perlu dikawal agar tidak menjadi instrumen disinformasi.

2. Pengaruh Media Sosial terhadap Pemilihan Politik

Masyarakat di Kabupaten Bangkalan

Mayoritas Penelitian ini mengungkap bahwa media sosial memiliki dampak yang nyata dan signifikan terhadap preferensi serta perilaku politik masyarakat di Kecamatan Bangkalan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif dari pesan-pesan politik yang beredar di ruang digital, tetapi juga menunjukkan respons aktif yang memengaruhi pilihan politik mereka dalam konteks pemilu. Media sosial memungkinkan masyarakat terpapar informasi secara cepat, masif, dan dalam berbagai bentuk, mulai dari teks, gambar, video pendek, hingga infografik interaktif.

Sebagaimana dicontohkan oleh Taufik, seorang buruh harian, keputusan politiknya mengalami perubahan setelah melihat sebuah konten viral di TikTok yang menampilkan perilaku tidak etis dari seorang calon legislatif. Hal serupa juga diungkapkan oleh Rizal, yang menyatakan bahwa teman-teman sebayanya banyak yang menetapkan pilihan politik berdasarkan konten kampanye yang dinilai kreatif dan menarik di

platform seperti Instagram dan YouTube. Ini mengindikasikan bahwa media sosial bukan sekadar media penyalur informasi, tetapi juga alat persuasi yang sangat kuat yang mampu mengubah persepsi dan pilihan politik dalam waktu singkat.

Dari aspek kognitif, konten politik yang dikemas secara visual dan emosional lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan narasi panjang yang bersifat formal. Sifat instan dan atraktif dari media sosial membuatnya sangat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan politik yang berdampak langsung terhadap pembentukan opini. Tidak mengherankan jika politisi maupun tim kampanye kini semakin memprioritaskan strategi komunikasi digital dalam menjangkau pemilih, terutama generasi muda.

Di sisi lain, tidak dapat diabaikan bahwa media sosial juga menjadi sarana penyebaran informasi yang menyesatkan. Bu Nur, salah satu informan, menyampaikan kekhawatirannya terhadap konten yang mengandung unsur kebencian, politik identitas, atau manipulasi naratif yang dapat

memecah belah masyarakat. Bagi masyarakat yang kurang memiliki keterampilan kritis dalam menyaring informasi, terutama kelompok usia lanjut atau yang kurang akrab dengan teknologi, konten semacam ini bisa dengan mudah dipercayai dan memengaruhi keputusan politik secara tidak rasional.

Secara keseluruhan, pengaruh media sosial terhadap pemilihan politik masyarakat dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama. Pertama, pengaruh langsung—yakni perubahan pilihan politik akibat paparan konten yang menampilkan citra positif atau negatif seorang tokoh atau partai. Kedua, pengaruh tidak langsung—yang terjadi melalui diskusi di ruang-ruang digital seperti grup WhatsApp atau kolom komentar Facebook, yang secara perlahan membentuk keyakinan politik individu terhadap isu atau figur tertentu.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa media sosial telah menjadi aktor baru dalam peta perpolitikan lokal. Ia bukan lagi sekadar alat pelengkap dalam proses demokrasi, melainkan telah menjadi

arena utama tempat masyarakat menentukan sikap, memperdebatkan ide, dan menetapkan pilihan politik. Namun demikian, besarnya pengaruh media sosial harus dibarengi dengan peningkatan literasi digital agar demokrasi yang terbentuk di ruang maya tetap sehat, terbuka, dan inklusi

D. Kesimpulan

Media sosial kini telah menjelma menjadi salah satu kekuatan dominan dalam membentuk dinamika perilaku politik masyarakat, termasuk di wilayah Kecamatan Bangkalan. Peranannya terlihat signifikan dalam mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik, membentuk opini publik, serta menjembatani komunikasi langsung antara calon pemimpin dan pemilih. Kehadiran platform digital seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan WhatsApp menciptakan ruang partisipatif yang inklusif dan mudah diakses, terutama bagi generasi muda yang cenderung lebih aktif dan adaptif terhadap teknologi. Melalui media sosial, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pelaku aktif dalam menyampaikan pandangan, membentuk narasi politik, dan

mengawal jalannya proses demokrasi secara virtual.

Akan tetapi, meskipun media sosial membawa berbagai manfaat dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan politik, pengaruh positif tersebut tidak datang tanpa tantangan yang serius. Salah satu hambatan utama adalah maraknya penyebaran informasi yang salah, seperti hoaks politik dan disinformasi yang sengaja disebar untuk memanipulasi opini publik. Masalah ini diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, yang membuat sebagian besar pengguna media sosial kurang mampu membedakan antara informasi yang sah dengan yang menyesatkan. Ketidaktahuan terhadap cara memverifikasi informasi membuat masyarakat rentan menjadi korban dari propaganda politik yang tidak bertanggung jawab.

Saran

Terkait Peran Penggunaan Media Sosial oleh Masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam Konteks Politik Mengingat media sosial telah menjadi arena utama dalam membentuk opini publik dan partisipasi politik di Kecamatan Bangkalan, disarankan agar pemerintah daerah dan lembaga pendidikan lokal berkolaborasi dalam

menyelenggarakan program literasi digital yang berkelanjutan. Program ini harus dirancang untuk semua lapisan masyarakat, dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan usia dan tingkat pendidikan, agar masyarakat tidak hanya mampu menggunakan media sosial sebagai sarana ekspresi politik, tetapi juga memahami risiko, etika, dan tanggung jawab di balik setiap informasi yang dibagikan.

Terkait Pengaruh Media Sosial terhadap Pemilihan Politik Masyarakat Kabupaten Bangkalan Berdasarkan temuan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi politik masyarakat, khususnya melalui konten visual yang viral, disarankan agar para aktor politik dan penyelenggara pemilu memanfaatkan media sosial secara lebih etis dan edukatif. Kampanye digital sebaiknya tidak hanya berorientasi pada popularitas, tetapi juga memberikan ruang dialog, klarifikasi, dan pendidikan politik yang sehat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengaruh media sosial tidak menjadi instrumen manipulasi, melainkan sarana untuk memperkuat demokrasi yang partisipatif dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. (2021). *Media sosial dan perilaku politik masyarakat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 18(2), 45–56.
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Entman, R. M. (2018). *Scandal and silence: Media responses to presidential misconduct*. Polity.
- Hidayat, R., & Firmansyah, A. (2021). Media sosial dan dinamika politik lokal. *Jurnal Komunikasi Politik*, 9(1), 12–23.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kelsey, D., et al. (2020). *Social media and political communication: Theories and practices*. Palgrave Macmillan.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. In L. Bryson (Ed.), *The communication of ideas* (pp. 37–51). Harper & Row.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- McCombs, M., & Shaw, D. (2020). *The agenda-setting theory*. Wiley-Blackwell.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Mutz, D. C., & Mondak, J. J. (2006). The workplace as a context for cross-cutting political discourse. *Journal of Politics*, 68(1), 140–155.